

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU :

- Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005
- Agusmidah, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2013
- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*. Bandung, PT Alumni, Edisi ke-2 Cetakan ke-4, 2011
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, Mandar Maju, 1990
- J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung, PT Alumni, 2003
- Narsif, *Diktat Hukum Diplomatik dan Konsuler, buku I : tentang hubungan diplomatik*, 2007
- Ranny Emilia, *Praktek Diplomasi*, Jakarta, Baduose Media, 2013
- Sefriani, *Hukum Internasional : Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010
- Sendjun H. Manulang, *Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011

- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, UI pers, 2012
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2006
- Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik Teori dan Kasus*, Bandung, Alumni, Cetakan ke-3, 2013
- Syahmin Ak, *Hukum Diplomatik, Dalam Kerangka Studi Analisis*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2008
- Todung Mulya Lubis & Alexander Lax, *Kontroversi Hukuman Mati Perbedaan Pendapat Hakim Konstitusi*, Jakarta, Kompas, 2009

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
- Konvensi ILO No. 97 tahun 1945 tentang migrasi tenaga kerja
- Konvensi ILO No. 105 tentang penghapusan kerja paksa yang telah diratifikasi melalui Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang pengesahan konvensi ILO mengenai penghapusan kerja paksa
- Konvensi ILO No. 111 tahun 1957 tentang diskriminasi (dalam hal pekerjaan dan jabatan)
- Konvensi ILO No. 138 tahun 1973 tentang usia minimum diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1999
- Konvensi ILO No. 143 tahun 1975 tentang pekerja migran
- Konvensi ILO No. 156 tahun 1981 tentang pekerjaan dengan tanggung jawab keluarga
- Konvensi ILO No. 189 dan Rekomendasi No. 201 tentang kerja layak bagi pekerja rumah tangga
- Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik
- Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler

- Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya No. 158 (*UN Convention on the protection of the rights of all migran and member og their families*)
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
- Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
- Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia diluar Negeri
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor PER.22/MEN/XII/2008 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Diluar Negeri
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor : PER.07/MEN/III/2005 tentang Ketentuan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi Dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER.23/MEN/IX/2009 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kerja Bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : PER.07/MEN/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia.
- Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-2019 melalui keputusan menteri luar negeri Indonesia Nomor : 01/B/RO/IV/2015/01

C. WEBSITE dan JURNAL :

- <http://www.beritasatu.com/nasional/287806-menteri-yohana-ungkap-7-kelemahan-uu-TKI.html> (diakses pada tanggal 17 Desember 2015 pukul 14.52)
- <http://www.bnp2TKI.go.id/frame/9003/Sejarah-Penempatan-TKI-Hingga-BNP2TKI> (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 pukul 19.24 WIB)
- http://www.bnp2TKI.go.id/stat_penempatan/indeks (diakses pada tanggal 1 Februari 2016 pukul 21.37)
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Qisas> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 pukul 19.40 WIB)
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/227933-kronologi-kasus-ruyati-versi-kbri> (diakses pada tanggal 04 November 2015 pukul 11.09 WIB)
- <http://www.slideshare.net/manueljackson39/hubungan-diplomatik-indonesia-arab-saudi-2> (Diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 pukul 18.59 WIB)
- <http://www.tribunnews.com/nasional/2015/04/18/37-TKI-terancam-hukuman-mati-tidak-sedang-menunggu-eksekusi-mati> (diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 pukul 20.04)
- Jurnal Diplomasi oleh Direktorat Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2011
- Jurnal Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan, dan Purna Penempatan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta , 2012
- Jurnal Sinkronisasi Dan Harmonisasi Pengaturan Mengenai Peraturan Daerah, Serta Uji Materi Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 oleh Novianto M. Hantoro